

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Chairul. *Hukum internasional: Horizon baru hukum laut internasional: Konvensi hukum laut 1982*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Fuady, Munir. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 2. Jakarta: Jakarta Ghalia, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung: kerjasama antara PT. Alumni Bandung dengan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 2003.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2008.
- Palupi, Dwi Astuti. "Hukum Laut Internasional." Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia (edisi revisi)*. Refika Aditama, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Tahar, Abdul Muthalib. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

Jurnal:

- Arrazy, Masruqi, dan Rindy Primadini. "Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 14, no. 1 (2021): Hal. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24>.
- Hikmawati, Puteri. "Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan." *Negara Hukum* Vol. 3, no. 1 (2012): Hlm. 77-96.
- Irianto, Bambang S. "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan." *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022): 26. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>.
- Nasirin, Chairun, dan Dedy Hermawan. "Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2017): 9.

<https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>.

Normasari, Nadhila Widya, dan Reni Windiani. "Asean Value : Analisis Respon Negara asing dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal pada Masa Pemerintahan Jokowi." *Journal of International Relations* 8, no. 2 (2022): 82–87. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Nurhakim, Rochman. "MENAKAR ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)." Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017.

Puspoayu, Elisabeth Septin. "TINJAUAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Rachmawati, Amalia Fadhila. "Hermeneutika Asas Teritorial dalam Kasus Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 117–33. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2633>.

Peraturan Perundang-undangan / Konvensi / Dokumen Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

-----, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982).

Skripsi:

Silviani, Vivi. "Analisis Pasal 73 UNCLOS Terhadap Tindakan Penenggelaman Kapal Asing Dalam Rangka Pemberantasan *Illegal Fishing*" Universitas Jambi, 2020.

Pambudhi, Risthu. "Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (studi pasal 69 ayat (4) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan)." Universitas Brawijaya, 2016.

Web atau artikel:

- Ambari, M. "Tahun Berganti, Sengketa Laut Masih Belum Berakhir di Natuna." MONGABAY, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/17/tahun-berganti-sengketa-laut-masih-belum-berakhir-di-natuna/>.
- "Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis." Diakses 6 Maret 2023. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.
- FAO. "International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing." Rome, 2001. <http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf>.
- Katadata.co.id. "488 Kapal Ikan Ilegal Ditenggelamkan KKP di Bawah Kepemimpinan Susi Pujiastuti," n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-illegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>.
- KKP| Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. "KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Asal Malaysia di Selat Malaka." SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: SP.910/SJ.5/IX/2021, 2021. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>.
- Kompas.com. "Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal," 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-penenggelaman-kapal>.
- Nirajan, Ajit. "Bagaimana Melindungi Lautan dari Perubahan Iklim?" DW, 2022. <https://www.dw.com/id/bagaimana-melindungi-lautan-dari-perubahan-iklim/a-62299663>.
- "Polemik Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Illegal Fishing." HUKUM ONLINE.COM, 11 Januari 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-penerapan-sanksi-penenggelaman-kapal-illegal-fishing-lt5a572dfcf2aaf/>.
- PSKP, "Perlukan melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal" <http://www.pskp.or.id/2020/10/04/perlukah-melanjutkan-kebijakan-penenggelaman-kapal/>
- RI, DPR. "Profil UU Perikanan No. 31 Tahun 2004." Diakses 17 November 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/32>.